



Lamongan  
Megilan



# RSUD KARANGKEMBANG



## LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO



Jl. Raya Jombang KM.2 Babat ☎ (0322) 4651378 kode Pos 62271

E-mail : [rsudkarangkembang@gmail.com](mailto:rsudkarangkembang@gmail.com)

Website : [lamongankab.go.id/rsud-karangkembang](http://lamongankab.go.id/rsud-karangkembang)  
[rsudkarangkembang](http://rsudkarangkembang) @ Rsud Karangembang

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisiensi, transparan dan akuntabel, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilor yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
2. Keandalan pelaporan keuangan
3. Pengamanan aset negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, RSUD Karangembang menyusun Rencana Tindak Pengendalian sebagai acuan bagi para penyelenggara organisasi sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Tindak Pengendalian RSUD Karangembang di prioritaskan untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya tujuan dan sasaran didukung sistem pengendalian intern yang memadai.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan

Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

## II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Lingkungan pengendalian merupakan kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

1. Penegakan integritas dan nilai etika
2. Komitmen terhadap kompetensi
3. Kepemimpinan yang kondusif
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
7. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Terciptanya lingkungan pengendalian yang kondusif mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi.

Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern Control Environment Evaluation (CEE) kepada 41 responden menunjukkan hasil lingkungan pengendalian masih ada yang kurang memadai yaitu :

1. Komitmen terhadap Kompetensi
2. Kepemimpinan yang Kondusif

Dari hasil penilaian lingkungan pengendalian tersebut selanjutnya divalidasi dan disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada RSUD Karangembang, diperoleh gambaran sebagai berikut :

**Tabel 1.**  
**Penilaian terhadap lingkungan pengendalian**

No.	Sub Unsur	Kondisi
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Kurang memadai

4.	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6.	Penyusunan dan Penetapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif	Memadai
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur yang paling penting dalam penerapan pengendalian intern. RSUD Karangsembang berharap dengan adanya lingkungan pengendalian yang kondusif sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian di RSUD Karangsembang yang masih perlu diperbaiki. Adapun langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.**  
**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	a. Internalisasi peraturan melalui sosialisasi maupun penyampaian saat melakukan apel pagi kepada seluruh pegawai rumah sakit b. Menyusun dan mensosialisasikan kode etik ke seluruh pegawai RSUD Karangembang Kabupaten Lamongan c. Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap kode etik	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	3 Bulan
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	a. Menyusun Standar Prosedur Operasional untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada RSUD Karangembang b. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di RSUD Karangembang c. Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai meningkatkan kompetensi kinerja di RSUD Karangembang	Direktur	3 Bulan
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	a. Membentuk Tim Mutu RSUD Karangembang b. Mengambil keputusan selalu mendasarkan pada data hasil penilaian risiko c. Mengarahkan seluruh sumber daya dan potensi RSUD Karangembang untuk melakukan perubahan dalam rangka mencapai kinerja yang	Seksi Pelayanan	2 Bulan

		lebih baik		
4.	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	<p>a. Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan RSUD Karangsembang berdasarkan SOTK RSUD Karangsembang</p> <p>b. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam RSUD Karangsembang</p>	Direktur	6 Bulan
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	<p>a. Melakukan review dan evaluasi secara periodik dalam pendelegasian wewenang dan tanggungjawab</p> <p>b. Wewenang diberikan kepada pegawai yang sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan RSUD Karangsembang</p>	Direktur	6 Bulan
6.	Penyusunan dan Penetapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	<p>a. Berkoordinasi dengan BKPSDM Pemerintah Kabupaten Lamongan terkait program pengembangan SDM Memberikan prioritas pengembangan SDM RSUD Karangsembang</p>	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	1 Tahun
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	<p>a. Penyusunan rencana tindak lanjut terhadap temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP</p> <p>b. Meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Karangsembang</p> <p>c. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Karangsembang</p>	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	2 Bulan
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	<p>a. Meningkatkan komunikasi dengan instansi pemerintah terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing</p> <p>b. Diwujudkan dengan adanya mekanisme</p>	Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	2 Bulan

		hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)		
--	--	---	--	--

**Tabel 3.**  
**Pengendalian yang Sudah Dilakukan**

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penganggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>						
1.	Tidak tersedianya pelayanan dokter spesialis tertentu	ROO.23.37.76.01	Pengadaan MoU dengan dokter spesialis tertentu	-	1 Melakukan pengadaan dokter spesialis tertentu 2 Melakukan MoU dengan dokter spesialis tertentu	Kasubag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	6 Bulan
2.	Adanya sanksi/denda keterlambatan pembayaran listrik air dan internet	ROO.23.37.76.01	1 Koordinasi dengan pihak penyedia jasa 2 Manajemen waktu tagihan belanja listrik, air dan internet	-	1 Membuat manajemen waktu tagihan belanja listrik, air dan internet 2 Menggunakan genset saat akses dan jaringan terputus	Kasubag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	3 Bulan
3.	Kunjungan pasien/masyarakat ke RSUD Karangembang masih dibawah target	ROO.23.37.76.01	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala	-	1 Melakukan kegiatan promkes melalui Bakti Sosial secara terjadwal setiap bulan 2 Duta Layanan RSUD Karangembang 3 Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan dengan tim Promosi Kesehatan RSUD Karangembang	RSUD Karangembang	6 Bulan
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>						
1.	Rendahnya capaian prosentase BOR	ROO.22.02.64.01	Melakukan promosi rumah sakit dan sosialisasi melalui media sosial, serta membuat inovasi-	-	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia dan meningkatkan promosi dan sosialisasi rumah sakit	Kasubag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Kasi Pelayanan	3 Bulan

		inovasi layanan rumah sakit				
--	--	-----------------------------	--	--	--	--

### **III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

Hasil kegiatan penilaian risiko dituangkan dalam rancangan kegiatan pengendalian intern yang berfokus pada upaya penanganan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama RSUD Karangembang.

**Tabel 4.**  
**Daftar Rencana Tindak Pengendalian (RTP)**

No.	Risiko	Penyebab	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung jawab RTP	Target Waktu Penyelesaian
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>				
1.	Tidak tersedianya pelayanan dokter spesialis tertentu	Keterbatasan dokter spesialis tertentu yang ada di RSUD Karangembang karena lokasi strategis di pinggir jalan Raya-Jombang sering terjadi KLL sehingga untuk kasus orthopedi dibutuhkan	1 Melakukan pengadaan dokter spesialis tertentu 2 Melakukan MoU dengan dokter spesialis tertentu	Kasubag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	6 Bulan
2.	Adanya sanksi/denda keterlambatan pembayaran listrik air dan internet	Keluarnya tagihan yang mendekati batas waktu	1 Membuat manajemen waktu tagihan belanja listrik, air dan internet 2 Menggunakan genset saat akses dan jaringan terputus	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan	3 Bulan
3.	Kunjungan pasien / masyarakat ke RSUD Karangembang masih dibawah target	Kurangnya kualitas dan kuantitas untuk kegiatan promosi kesehatan RSUD Karangembang (tidak terjadwal secara periodik)	1 Melakukan kegiatan promkes melalui Bakti Sosial secara terjadwal setiap bulan 2 Duta Layanan RSUD Karangembang 3 Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan dengan tim Promosi Kesehatan RSUD Karangembang	RSUD Karangembang	6 Bulan
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>				

1.	Rendahnya capaian prosentase BOR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan sarana dan prasarana rumah sakit</li> <li>2. Banyaknya rumah sakit swasta yang ada di wilayah Kecamatan Babat</li> </ol>	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia dan meningkatkan promosi dan sosialisasi rumah sakit	Kasubag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Kasi Pelayanan	3 Bulan
----	----------------------------------	---	---	---	---------

#### **IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan melaksanakan pengendalian sesuai dengan yang diinginkan. Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh RSUD Karangsembang dalam rangka mendukung pelayanan rujukan terhadap masyarakat.

Rancangan Informasi dan Komunikasi idealnya dilaporkan perkembangannya secara rutin, minimal setiap 6 bulan agar bila terdapat kendala yang muncul dapat segera dicari solusi dan pemecahan masalahnya. Laporan minimal berisi hal-hal sebagai berikut :

- a Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian yang digunakan
- b Penyedia Informasi/Penanggung jawab tindak lanjut
- c Penerima informasi/tindak lanjut
- d Waktu pelaksanaan
- e Realisasi waktu pelaksanaan

Adapun rancangan informasi dan komunikasi RSUD Karangsembang adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.**  
**Rancangan Informasi dan Komunikasi**

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>					
1.	1 Melakukan pengadaan dokter spesialis tertentu 2 Melakukan MoU dengan dokter spesialis tertentu	Surat Permohonan MoU dokter spesialis	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Internal	6 Bulan	6 Bulan
2.	1 Membuat manajemen waktu tagihan belanja listrik, air dan internet 2 Menggunakan genset saat akses dan jaringan terputus	Rekening tagihan belanja listrik, air dan internet	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Internal	3 Bulan	3 Bulan
3.	1 Melakukan kegiatan promkes melalui Bakti Sosial secara terjadwal setiap bulan 2 Duta Layanan RSUD Karangembang 3 Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan dengan tim Promosi Kesehatan RSUD Karangembang	SK Direktur Tim Promosi Kesehatan RSUD Karangembang	RSUD Karangembang	Internal	6 Bulan	6 Bulan
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>					
1.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia dan meningkatkan promosi dan sosialisasi rumah sakit	SK Direktur Tim PKRS Laporan Asset RS Leaflet Media Sosial	Tim PKRS dan Petugas Asset	Internal dan Eksternal	3 Bulan	3 Bulan

## **V. RANCANGAN PEMANTAUAN**

Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk menyakinkan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan dengan baik. Pemantauan dan evaluasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi :

**Tabel 6.**  
**Rancangan Pemantauan**

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>				
1.	1 Melakukan pengadaan dokter spesialis tertentu 2 Melakukan MoU dengan dokter spesialis tertentu	Pengadaan MoU dengan dokter spesialis tertentu	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Tribulan I	Tribulan I
2.	1 Membuat manajemen waktu tagihan belanja listrik, air dan internet 2 Menggunakan genset saat akses dan jaringan terputus	1. Koordinasi dengan pihak penyedia jasa 2. Manajemen waktu tagihan belanja listrik, ar dan internet	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Tribulan I	Tribulan I
3.	1 Melakukan kegiatan promkes melalui Bakti Sosial secara terjadwal setiap bulan 2 Duta Layanan RSUD Karangembang 3 Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan dengan tim Promosi Kesehatan RSUD Karangembang	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala	Direktur dan Tim Promosi Kesehatan RSUD Karangembang	Tribulan I	Tribulan I
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>				
1.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia dan meningkatkan promosi dan sosialisasi rumah sakit	Meningkatkan promosi dan sosialisasi rumah sakit dengan membentuk Tim PKRS serta membuat inovasi-inovasi layanan rumah sakit	Kasubag Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Kasi Pelayanan	Tribulan I	Tribulan I

## **VI. PENUTUP**

Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang berkelanjutan yang keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh karakteristik sumber daya manusia. Efektivitas pengembangan lingkungan pengendalian sangat bergantung pada keberhasilan penganakan integritas dan etika serta adanya komitmen dan teladan dari pimpinan untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif. Demikian juga efektivitas identifikasi risiko sangat dipengaruhi oleh pertimbangan dan komitmen dari seluruh pegawai.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) disusun sebagai tindak lanjut SPIP yang merupakan uraian tentang bagaimana instansi pemerintah diharapkan dapat mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko.

Rencana Tindak Pengendalian Intern RSUD Karangembang merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan SPIP dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan rumah sakit melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

**DIREKTUR  
RSUD KARANGKEMBANG**

**dr. MAYA DEWI HANGGRANINGRUM, MMRS**  
NIP. 19830220 201001 2 016

## **VII. LAMPIRAN**

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)  
2023

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN

CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Pemda : RSUD Karangsembing

No	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																																SIMPULAN KUOSIONER CEE										
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32		R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	Modus
<b>A</b>	<b>PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>																																	<b>Memadai</b>										
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	4	3	4	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	4	3	2	2	3	4	4	2	3	3	3	3	3	2	2	4	3	4	3	3	2	1	2	3	Memadai		
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	3	4	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	2	4	3	3	3	3	2	3	3	Memadai		
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	4	3	4	2	3	2	4	2	2	3	2	2	2	2	3	3	4	3	3	1	3	4	4	2	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	1	2	2	3	Memadai	
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	4	3	4	3	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	3	2	4	3	3	2	3	4	4	2	3	2	3	3	3	2	3	3	4	2	4	2	3	1	1	1	3	Memadai	
<b>B</b>	<b>KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>																																	<b>Kurang Memadai</b>										
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	3	4	3	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	1	4	2	2	2	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	2	3	4	3	4	3	3	1	2	1	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	4	3	4	3	2	2	1	3	3	3	2	2	2	3	4	3	4	3	2	2	4	4	4	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	4	2	3	1	1	2	3	Memadai
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	4	3	4	2	2	2	2	4	3	3	3	2	1	3	4	2	4	3	3	3	3	4	4	3	3	2	3	3	3	2	2	3	2	2	4	3	2	3	3	3	3	Memadai	
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	2	4	2	3	2	2	3	2	3	2	2	1	2	4	2	3	3	2	1	3	4	4	3	3	4	3	3	3	2	2	3	2	2	4	3	1	1	2	2	2	Kurang Memadai	
<b>C</b>	<b>KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>																																	<b>Kurang Memadai</b>										
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	2	4	3	2	2	2	2	3	3	3	2	1	2	3	2	4	3	2	1	3	4	4	2	3	2	3	2	3	3	2	2	3	3	2	4	3	3	1	2	1	2	Kurang Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	4	3	4	3	3	2	2	2	3	3	3	2	1	2	3	2	4	2	2	1	3	4	4	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	2	4	3	3	1	2	1	3	Memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggal pelaporan risiko/masalah	4	2	4	3	3	2	3	3	3	3	2	2	1	3	3	2	4	3	3	3	3	4	4	2	3	1	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	4	2	2	2	3	Memadai	
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	2	4	3	3	2	3	3	3	3	2	2	1	2	4	2	4	3	2	2	3	4	4	2	3	2	3	2	3	3	3	3	4	4	2	4	2	4	1	2	2	2	Kurang Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	3	2	4	2	3	3	3	4	4	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	1	3	2	3	Memadai